

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN AMAR PUTUSAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI(Studi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)

 Oleh: Armand Ardi Winata (06400018)

Law

Dibuat: 2010-06-18 , dengan 6 file(s).

Keywords: Kata Kunci : Amar putusan, uang pengganti, korupsi.

ABSTRAKSI

Obyek penelitian dalam Skripsi ini adalah Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Amar Putusan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung). Permasalahan yang diambil dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi?, Faktor-faktor apakah saja yang menjadi kendala dalam hal pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi ?, Bagaimana solusi dari kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi?. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam hal pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Untuk mengetahui solusi dari kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Dan Metode yang di pakai dalam menganalisa data yaitu menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu pembahasan berdasarkan melihat kenyataan yang terjadi dimasyarakat yang berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum.

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam hal pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dan Untuk mengetahui solusi dari kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Dan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti Dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik dalam menjalankan pidana uang pengganti sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah disempurnakan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan dapat disarankan agar Perlunya Undang-undang yang memberikan sanksi yang tegas agar tidak menimbulkan anggapan dari terpidana bahwa dari pada mengembalikan uang pengganti lebih baik subsider beberapa bulan atau tahun pidana penjara selain itu juga Perlunya sebuah transparansi dari aparat penegak hukum yang dalam hal ini aparat penegak hukum yang berhubungan langsung dengan penanganan kasus tindak pidana korupsi, hal tersebut diperlukan karena masyarakat masih terdoktrin dengan citra buruk para aparat penegak hukum pada zaman setelah reformasi ini, terlebih lagi dengan tersandungnya oknum-

oknum aparat penegak hukum dengan kasus-kasus korupsi yang dia tangani sendiri

ABSTRACT

Object of this study is evaluation juridical sociologist to constraint execution of crime decision of money payment substitution in corruption act (study in Bandar Lampung Supreme Court).

Problems of this study are (1) How the execution of crime decision money payment substitution in corruption act? (2) What are the factors of constraint execution of crime decision of money payment substitution in corruption act? (3) How the solution of constraints that faced in execution of crime decision in corruption act. The purposes of this research are to know the execution of crime decision of money payment in corruption act, to know the factors of constraint execution of crime decision of money payment substitution in corruption act, and to know the solution of constraints that faced in execution of crime decision of money payment substitution in corruption act. This research method to analyze the data is juridical sociologist method. It discussed because the research happened in society that related with rule of legislation and the law theories.

This study focus on the execution of crime decision of money payment substitution in corruption act in Bandar Lampung Supreme Court, the factors of constraint in execution of crime decision of money payment substitution in corruption act, and the solution of constraints that faced in execution of crime decision of money payment substitution in corruption act. In short, this crime decision in Bandar Lampung Supreme Court has succeeded to execute the duty in execution of crime money substitution. As arranged by Indonesia laws number 31 year 1999 about eradication of corruption act that have been complete with Indonesia laws number 20 year 2001. The important of laws have to give distinct sanction in order not to arouse suspicion of the convict that subsider to have crime some months or year had better than refunding money substitution. Besides, the importance of government enforcer of direct corresponding law with handling of corruption case. It is important because the society still have been doctrine by bad image of the enforcers after this reform. In addition, many government enforcer have problem with corruption cases that handled by themselves.